

TAJUK RENCANA

Kejar Vaksinasi, Raih 'Herd Immunity'

PEMDA DIY terus mengejar target vaksinasi agar meraih 'herd immunity' atau kekebalan komunal. Dilihat dari persentase kemajuannya, sudah signifikan karena cakupan vaksinasi Covid-19 di DIY dosis pertama telah mencapai 86,56 persen atau 2.492.597 orang, sedang dosis kedua 1.645.487 orang atau 57,14 persen pada 11 Oktober (KR 13/10). Ini artinya sudah mendekati target total sasaran 2.879.699 orang. Kita optimis target ini bisa tercapai setelah dilakukan percepatan vaksinasi baik melalui vaksinasi massal, vaksinasi keliling hingga jemput bola.

Selain percepatan, kita juga mendorong pemerataan di semua wilayah, satu kota dan empat kabupaten, sehingga status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bisa segera turun dari level 3 menjadi level 2 dan seterusnya. Tak kalah penting adalah percepatan vaksinasi pada kelompok sasaran lanjut usia dan remaja. Karena hal itu menjadi salah satu indikator untuk menurunkan level.

Lantas, apa yang harus disiapkan setelah status PPKM di DIY nanti turun menjadi level 2? Selain tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes), tentu harus dipersiapkan strategi yang lebih matang untuk melakukan pencegahan, terutama terkait dengan masuknya orang dari luar daerah yang ternyata membawa virus Korona. Kita tak boleh lagi kecolongan, sehingga pengawasan dan penjagaan si setiap pintu masuk tetap diintensifkan.

Hal ini perlu kita ingatkan karena pascapenerunan status PPKM, nampak pengawasan mulai mengendur, bahkan mobilitas masyarakat makin meningkat seperti pada masa normal

sebelum pandemi. Kita tentu tak ingin ada gelombang ketiga Covid-19 seperti dikhawatirkan banyak pihak. Berdasar pengalaman, angka kasus akan naik usai libur panjang. Kenaikan tidak terjadi serta merta, melainkan muncul setelah sebulan dua bulan pasca liburan. Inilah yang harus diantisipasi agar peristiwa serupa tidak berulang.

Pergeseran hari libur oleh pemerintah adalah bagian dari upaya untuk mengantisipasi terjadi kerumunan karena libur panjang. Tentu ini tidaklah cukup. Sebab, seperti kita lihat saat ini, khusus hari Sabtu-Minggu, jumlah pengunjung di destinasi wisata selalu mbludak, sehingga kerumunan pun tak terhindarkan. Artinya, antisipasi tak cukup hanya ditujukan pada hari libur panjang, tapi juga hari-hari biasa, karena hasrat masyarakat untuk berwisata sangat tinggi—kalau tak boleh dibilibang ini sebagai fenomena 'revenge tourism'.

Dari aspek ekonomi pariwisata tentu sangat menguntungkan, karena industri di bidang ini mulai bergerak setelah cukup lama terpuruk. Terkait itu, kita mendorong segera dilakukan pengamatan skrining pengunjung, yakni melalui pemasangan QR Code yang langsung terhubung dengan aplikasi PeduliLindungi Kemenkes, selain juga keharusan bagi pelaku usaha mengantongi sertifikat CHSE sebagai syarat mendapatkan QR Code. Ini juga harus dilakukan percepatan karena semua harus berjalan seiring, baik itu vaksinasi maupun pemasangan QR Code di setiap tempat keramaian. Dengan cara itu, kita yakin DIY bisa mengendalikan Covid-19 dan meraih herd immunity. □

Memantapkan Ekspor Komoditas Pertanian

Opik Mahendra

di penentu kecepatan dan kualitas pemulihan ekonomi di masa pandemic ini. Bagi negara yang berbasis sumberdaya alam, nyaris tidak mungkin untuk mengandalkan pembangunan ekonomi hanya dari unsur konsumsi semata, sekalipun potensi untuk hal tersebut cukup besar apalagi di masa pandemic yang membatasi aktivitas masyarakat untuk saling berinteraksi langsung.

Menurut Purcell (1979), pemasaran



KR-JOKO SANTOSO

DI TENGAH kondisi sulit pandemi, kinerja ekspor pertanian tetap berjalan mantap. Ekspor produk pertanian menunjukkan tren positif. Peningkatan ini disumbang kenaikan beberapa produk hasil pertanian, seperti rempah-rempah, buah-buahan, porang, sarang burung walet, dan hasil hutan. Kenaikan terjadi juga karena adanya dukungan mobilitas ekonomi di sejumlah negara yang juga terus membaik.

Sektor pertanian memiliki peran yang cukup besar terhadap kinerja ekspor nasional. Terbukti, melemahnya perekonomian imbas Covid-19 tidak membuat sektor pertanian lesu. Peluang ekspor di sektor pertanian ke sejumlah negara tujuan masih terbuka lebar.

Sepanjang Januari-Agustus 2021, nilai ekspor pertanian mencapai Rp 277,95 triliun atau meningkat 40,2% dari posisi 2020 yang sebesar Rp 198,13 triliun. Dari nilai tersebut, 8,25% merupakan produk segar, sedangkan 91,75% merupakan produk olahan pertanian. Berdasarkan subsektor, kontribusi terbesar ekspor berasal dari subsektor perkebunan 92,74%, kemudian pertanian 4,85%, hortikultura 1,62%, dan tanaman pangan 0,8%.

Kontribusi Pertanian

Pertumbuhan tersebut dinilai cukup menggembirakan karena kontribusi pertanian terhadap perkembangan ekonomi nasional cukup besar. Kenaikan ekspor pertanian dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan produk tanaman obat, aromatik, rempah-rempah, lada putih dan hasil hutan bukan kayu. Dengan kenaikan tersebut, pertanian sukses menyumbangkan angka ekspor terhadap nonmigas sebesar 94,36%.

Peningkatan ekspor diperlukan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi sekaligus mampu meningkatkan penyerapan lapangan kerja melalui investasi di sektor pertanian. Bersama investasi publik, belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat, komponen ekspor menja-

produk pertanian bertujuan menganalisis berbagai aktivitas bisnis yang terjadi dalam komoditas pertanian setelah produsen primer hingga sampai ke konsumen akhir. Pada kondisi ekonomi global saat ini, produk-produk pertanian yang dipasarkan tidak hanya merupakan produk primer pertanian, tetapi juga produk setengah jadi atau produk jadi dari pertanian.

Transformasi pertanian dari paradigma berbasis produksi menjadi berorientasi pada permintaan pasar juga ekspor perlu didorong agar petani sebagai subjek dapat memiliki *bargaining position* serta menikmati kesejahteraan, Trans-

formasi juga tidak mungkin dilakukan secara parsial. Transformasi secara holistik tersebut bisa dilakukan dengan prinsip kolaborasi *multi-stakeholders* yang berbasis korporasi.

Tenaga Kerja

Klasterisasi komoditas yang dibudidayakan petani yang sudah punya pangsa pasar didekatkan dengan industri. Komoditas pertanian untuk menghasilkan produk turunan atau produk jadi siap pakai. Strategi digunakan untuk memperbesar skala ekonomi. Berkumpulnya petani dalam satu klaster kawasan mempermudah dalam proses penyiapan produksi yang berkelanjutan agar pasokan stabil dan kontinyu.

Sektor pertanian juga mampu menyerap jutaan tenaga kerja yang terdampak PHK. Berdasarkan hasil survei BPS, angkatan kerja nasional yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor pertanian. Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024 dapat membantu penguatan ekonomi bangsa dengan berfokus pada substitusi impor dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui peningkatan akses pasar. Substitusi impor bisa mendorong pembangunan agroindustri serta investasi yang menarik dalam negeri sebagai strategi dan kebijakan pemerintah yang Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. □

*) **Opik Mahendra SP MSc**, Kepala Seksi Bina Usaha, Bidang P2BU, Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Jateng

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkannya fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-1100
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Bahasa Indonesia

BAHASA Indonesia adalah jati diri bangsa. Seperti halnya bangsa lain, bangsa Indonesia juga memiliki ciri khas dari bangsa lain di dunia. Jati diri itu sekaligus juga menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia di antara bangsa lain. Salah satu simbol jati diri bangsa Indonesia itu adalah bahasa, dalam hal ini tentu bahasa Indonesia. Hal itu sejalan dengan semboyan yang selama ini kita kenal, yaitu "bahasa menunjukkan bangsa".

Setiap bahasa pada dasarnya merupakan simbol jati diri penuturnya, begitu pula halnya dengan bahasa Indonesia juga merupakan simbol jati diri bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus kita jaga bersama, kita lestarikan, dan secara terus-menerus harus kita kembangkan agar tetap dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi modern yang mampu membedakan bangsa kita dari bangsa-bangsa lain di dunia. Lebih-lebih dalam era digital seperti sekarang ini, jati diri suatu bangsa menjadi suatu hal yang amat penting untuk dipertahankan agar bangsa kita tetap dapat menunjukkan keberadaannya di antara bangsa lain di dunia. Namun, bagaimana kondisi kebahasaan kita sebagai jati diri bangsa saat ini?

Bisa kita lihat bersama bahwasannya masih banyak warga masyarakat yang abai menggunakan Bahasa Indonesia secara baik dan benar. Contohnya, semauanya sendiri saat memposting sesuatu hal di sosial media, komentar negatif dan sebagainya yang memicu konflik.

Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang terangi kepada NKRI melalui bahasa Indonesia. Kita sebagai warga negara

Indonesia harus cinta kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang baik artinya sesuai dengan kaidah PUEBI dan tata bahasa baku yang diberlakukan oleh bangsa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kemudian penggunaan Bahasa Indonesia yang baik, artinya kita harus menggunakan bahasa Indonesia secara komunikatif sesuai dengan konteks sosial, agama, budaya, pendidikan, dan lingkungan di mana pun kita berada.

Seluruh rakyat Indonesia seharusnya merasa bangga memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, berbagai suku, ras, dan golongan dapat bersatu dalam bhineka tunggal ika. Segala perbedaan tidak dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa kita harus menggunakan dan memasyarakatkan Bahasa Indonesia, merujuk pada UU no 24 tahun 2009 mengenai bendera, lagu kebangsaan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, sebagai warga negara Indonesia yang mewarisi segala nilai perjuangan nenek moyang kita, marilah bersama-sama kita kembangkan: aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga berbahasa bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia luar biasa. Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarian Bahasa Daerah dan kuasai Bahasa Asing. □

*) **Catur Rohmiasih, Plarangan, Karanganyar, Kebumen.**

Pinjol Ilegal Merusak Moralitas Ekonomi

MASYARAKAT dibuat resah dengan adanya pinjaman online (pinjol) ilegal. Jika berurusan dengan pinjol, akan dihubungi semua kerabat dan sahabat yang ada dikontak handphone (HP). Mencemarkan nama baik. Muncul berbagai ancaman dalam proses penagihan. Nasabah dibuat stres dan menanggung malu. Beban utang dan mental semakin memperburuk kondisi ekonomi. Bahkan ada yang bunuh diri. Bunga yang mencekik, perjanjian yang tidak jelas dan sebagian besar dioperasikan dari luar negeri. Kepercayaan publik semakin tergeroti dengan banyak kasus pinjol ilegal.

Sejak tahun 2018 sampai 17 Agustus 2021, Kementerian Kominfo telah memutus akses 3.856 konten terkait teknologi finansial (*fintech*) yang melanggar peraturan perundangan, termasuk platform pinjol ilegal. Angka ini menunjukkan, kewaspadaan kejahatan *fintech* harus diperhatikan. Minimnya sosialisasi dari pemerintah, akan bahayanya terjerat utang pinjol ilegal.

Teror dan Intimidasi

Ekonomi terpuruk akibat dampak pandemi. Pengangguran semakin banyak. Kemiskinan terus meningkat. Kondisi yang carut marut dan tidak ada harapan. Masyarakat terpaksa ambil pinjaman yang dianggapnya mudah. Tidak perlu agunan untuk mendapat pinjaman. Cukup Kartu Tanda Penduduk (KTP). Modal HP dan download, pendaftaran yang singkat dan mudah. Hanya perlu hitungan menit uang masuk rekening pribadi.

Pinjol sangat membantu dan diminati masyarakat. Sayangnya, kondisi ini ditumpangih pihak yang tidak bertanggung jawab. Peluang pasar pinjol yang besar, melahirkan pinjol ilegal. Alhasil muncul berbagai kasus yang menimpa nasabah yang tidak mampu membayar pinjaman.

Hendro Puspito

Cara yang digunakan cukup ekstrim. Melalui teror dan intimidasi. Banyak nyawa yang hilang akibat teror pinjol ilegal. Kasus ini lebih jahat daripada pembunuhan secara nyata.

Pinjol dilahirkan untuk membantu ekonomi masyarakat. UMKM banyak terbantu dengan pinjol. Manfaatnya terasa dengan semakin tingginya minat masyarakat untuk menggunakan pinjol. Menurut data statistik cekrekening.id tertera bahwa pada Juni 2020 jumlah pengaduan rekening 194 rekening. Pada Mei 2021 meningkat drastis menjadi 2.403 rekening.

Pengalaman masyarakat fokus dari kemudahan saat pengajuan kredit. Tidak terlintas dibenak resikonya apa jika tidak mampu bayar. Peluang ini dimanfaatkan pinjol ilegal. Sehingga masyarakat tidak bisa membedakan antara pinjol legal dan ilegal. Fenomena seperti ini siapa yang salah? Apakah masyarakat atau pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketika *fintech* diresmikan, OJK seharusnya menjamin payung hukum. Sepenuhnya memproteksi jangan sampai pinjol ilegal menyusup.

Lemahnya perhatian dari OJK, menyebabkan pinjol ilegal merusak moralitas ekonomi. Masyarakat justru tidak terbantu, malah terbebani baik ekonomi maupun mental.

Rekomendasi

Banyak pekerjaan rumah perlu dibenahi dan dioptimalkan oleh OJK. Pertama, kebecoran data pribadi menjadi celah pinjol ilegal dalam menjalankan aksi kejahatan. Kenapa demikian? Karena

sistem pinjol mudah diretas. Kedua, minimnya sosialisasi terhadap masyarakat. Sehingga tidak ada pemahaman yang mampu membedakan pinjol legal dan ilegal. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) OJK harus ditingkatkan. Untuk memberikan edukasi yang luas. Keuntungan dan resiko pinjol perlu masyarakat pahami. Ketiga, maraknya pinjol ilegal yang terus meningkat. Upaya pemblokiran harus dioptimalkan.

Ketika upaya preventif dan kuratif yang dijalankan OJK lebih getol, kasus akibat pinjol ilegal dapat dimitigasi. Masyarakat akan terbantu dan minim risiko. Pemerintah juga berhasil dalam menangani ekonomi nasional. Banyak hal positif dari lahirnya pinjol yang sesuai asas manfaatnya. □

*) **Hendro Puspito SE MPSDM**, Pengusaha / Mahasiswa Program Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Pojok KR

Pemda DIY masih mengejar vaksinasi Covid-19 dosis lengkap.
-- **Tuntaskan dulu dosis pertama, bagi daerah yang belum.**

PPKM turun level, DPRD DIY ingatkan tanggung jawab warga.
-- **Disiplin prokes jadi kunci pengendalian.**

Kemendikbudristek kembali salurkan bantuan kuota data internet.
-- **Tetap harus dipantau agar efektif dan efisien.**

Berabs

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyaris, Kepala Biro: Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.